



Judul : Anggota DPR Kembali Jadi Tersangka
Tanggal : Jumat, 08 Februari 2019
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

KORUPSI DANA PERIMBANGAN

Anggota DPR Kembali Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terkena kasus hukum bertambah. Sukiman dari Fraksi Partai Amanat Nasional menjadi anggota DPR periode 2014-2019 ke-19 yang terjerat kasus korupsi setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka terkait pengurusan dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, dalam APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018.

Kasus ini merupakan pengembangan kasus dana perimbangan yang sebelumnya menjerat rekannya di DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono. Amin ditangkap KPK pada 4 Mei 2018. Ia diduga memperoleh uang senilai Rp 3,3 miliar dari sejumlah kepala daerah yang wilayahnya mendapat alokasi dana itu. Sejumlah daerah yang pimpinannya bersedia memberikan imbalan 7 persen dari total dana yang dialokasikan adalah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kota Tual.

"SKM (Sukiman) diduga menerima Rp 2,65 miliar dan 22.000 dollar Amerika Serikat

yang merupakan bagian dari komitmen *fee* sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Penerimaan suap antara Juli 2017 sampai April 2018 melalui berbagai pihak sebagai perantara," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Kamis (7/2/2019), di Jakarta.

Kabupaten Pegunungan Arfak mendapat dana alokasi khusus dalam APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 49,91 miliar dan dalam APBN 2018 sebesar Rp 79,9 miliar. Uang suap untuk Sukiman diberikan oleh Natan Pasomba, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak.

"Sekali lagi, KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara di pusat dan daerah, termasuk kawasan Papua dan Papua Barat, agar mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab dan hati-hati. Setidaknya sudah ada delapan perkara korupsi di wilayah Papua dengan 18 tersangka yang telah diproses sampai saat ini," ujar Saut.

Menurut catatan KPK, anggota DPR periode ini umum-

nya terjerat kasus korupsi yang berkaitan dengan alokasi dana untuk daerah. Mereka antara lain Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Yudi Widiana Adia, Andi Taufan Tiro, dan Musa Zainuddin dalam perkara pengurusan dana aspirasi untuk wilayah Maluku. Selain itu, ada I Putu Sudiartana (pengajuan dana alokasi khusus untuk Provinsi Sumatera Barat), Charles Jones Mesang (suap terkait penambahan anggaran dana tugas pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di sejumlah daerah), dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (suap terkait pengurusan dana alokasi khusus Kabupaten Kebumen).

Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan To Pan Husodo menyampaikan, pengalokasian dana pembangunan daerah rentan korupsi. "Proses politik di DPR membuka ruang terjadinya *deal* antara pemerintah daerah dan anggota DPR. Tidak heran jika kemudian banyak yang ditangani KPK. Transparansi sejak perencanaan hingga eksekusi ini perlu dilakukan," kata Adnan. (IAN)